

HARMONISASI PERAN PELAKU PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALISASIKAN FUNGSI PENDIDIKAN

**Oleh: Bambang Syaeful Hadi
FISE Universitas Negeri Yogyakarta**

Abstract

While education has broad and complex dimensions with each having its own problems, the problem-solving should be comprehensive. A disorder in the Indonesian educational world has been caused by, among others, a disharmony among the roles of the agents of education (i.e., the family, society, and school). Each performs with no coordination with any other of the agents. The result is that the education has not produced human individuals who are intellectually, socially, and religiously mature. Rather, oppositely, it has become counterproductive. A segregation of the roles has to be mapped clearly to avoid role overlaps which can make some important roles left unperformed.

The school, as a formal educational institution, is ideally the instrument enabling the maturation of students' intellectuality, their moral attitudes and behaviors, and their contextual skills so that what they obtain from school could be implemented in the society where they live. Society, as the environment where students associate with others, is ideally to give them enough room of trust in the course of motivating them for self-actualization, to restrain from demanding too much of them, to take part in monitoring and evaluating them, and to give material and non-material support. The family is a very central place for students' education, where certain other family members become role models and influence their psychological growth. The family condition becomes a determining factor of the success in their education at school and in society. Here the role of parents is highly significant. Whatever is obtained from

the school and society will become meaningless when the family does not give support, motivation, and exemplary modeling.

Optimum result of education could be achieved by harmonizing the roles of the agents of education. It needs sincere efforts through comprehensive research, commitment from each agent of education, collective awareness, and discussions by the agents of education to reformulate and reconstruct education so that a role map in the context of educational autonomy and curriculum implementation could be made. Educational autonomy and curriculum implementation could succeed well when there occurs a role harmonization among the three parties of agents of education. After the role mapping, each agent of education then involves itself in building up commitment, applying a cultural approach, constructing the school organization into a learning organization, applying a society-based curriculum, activating society's role, and strengthening the family's function by constructing it into a kind of *madrrasah* (high-school-level religious educational institution). Without such a function, its educational function cannot succeed to the optimum.

Key words: role harmonization, agents of education, educational function

Pendahuluan

Pendidikan merupakan ranah kehidupan yang sangat penting, yang dapat mengantarkan manusia pada derajat manusia sesungguhnya. Definisi paling umum dari pendidikan menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses pemanusiaan menuju lahirnya insan bernilai secara kemanusiaan (Danim, 2003). Meskipun hampir semua kalangan mengakui arti penting pendidikan, tetapi hingga kini wajah pendidikan di Indonesia masih carut-marut, dalam kurun waktu enam dekade pasca kemerdekaan pendidikan belum menampakkan hasil sesuai dengan harapan,

paling tidak dapat sejajar dengan apa yang telah dihasilkan oleh negeri-negeri tetangga. Berbagai persoalan melingkupi dunia pendidikan kita hingga saat ini, dari gedung-gedung sekolah yang tidak terawat, biaya sekolah yang makin tidak terjangkau, kurikulum dan implementasinya yang masih *absurd*, kekurangan tenaga pendidik, sampai pada rekonstruksi paradigma pendidikan belum terpecahkan secara memadai. Pendidikan masih belum menemukan polanya, berada di persimpangan antara diupayakan sungguh-sungguh atau setengah-setengah, meniru model Barat atautkah model ke-Indonesia-an.

Kebingungan ini tampaknya hingga kini masih berlarut-larut, sehingga pendidikan di Indonesia mengalami stagnasi, berjalan di tempat. Ketika didapati fakta bahwa Malaysia pernah banyak belajar dari Indonesia dan kini mereka mampu melaju melewati "gurunya". Kita hanya dapat membanggakan bahwa kita pernah menjadi gurunya dan akhirnya mengeluh saat disadari bahwa kita telah ketinggalan. Mengapa fakta pahit tersebut tidak menjadikan kita untuk berintrospeksi untuk kemudian merumuskan strategi dan mensinergikan seluruh komponen sumber daya bangsa ini untuk melakukan aksi. Ketika beberapa lembaga pendidikan tinggi di negeri Jiran (Singapura, Malaysia, Thailand) mampu bertengger pada papan atas universitas-universitas di Asia, Indonesia sebagai bangsa besar, negara besar (ukuran wilayah) dengan sumber daya alam yang besar hanya dapat menahan getir dan berakhir pada pembelaan diri dengan mengatakan bahwa instrumen yang dijadikan alat ukur lembaga penilai universitas di Asia tersebut tidak valid. Alasan lain karena penduduk Indonesia lebih besar, sehingga yang diurus juga banyak.

Penyakit kronis dunia pendidikan di Indonesia telah sedemikian parah, sehingga untuk melakukan tindakan penyembuhan diperlukan *general check up* agar penyelesaiannya juga menyeluruh. Selama ini perbaikan pendidikan hanya dilakukan secara parsial. Misalnya pembuatan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang bila dilaksanakan secara benar memerlukan energi besar dari guru,

ternyata tidak diikuti oleh kebijakan menaikkan kesejahteraan guru secara memadai. Contoh lainnya, pemberlakuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana 20% dari dana APBN ternyata tidak diikuti oleh pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang penuh kemauan, tetapi tidak mau kesungguhan dalam bertindak. Keburaman politik, ekonomi, hukum, budaya, dan aspek-aspek lainnya merupakan refleksi dari dunia pendidikan kita yang buram.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang mempunyai potensi besar. Ke depan masih ada kesempatan dan harapan, untuk itu bila bangsa ini ingin sejajar dengan bangsa lain mutlak diperlukan adanya perbaikan dunia pendidikan dalam segala aspeknya. Perbaikan kurikulum saja tanpa diikuti oleh perbaikan aspek-aspek pendukung lainnya, maka hal itu akan menjadi kurang bermakna. Kebijakan baru pemerintah dalam dunia pendidikan adalah pemberlakuan kurikulum KBK, yang melalui berbagai revisi akhirnya diresmikan pada tahun 2006 menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kebijakan pemberlakuan kurikulum tersebut merupakan keinsyafan akan kelemahan kurikulum sebelumnya. KBK yang mempunyai tujuan baik tidak akan berhasil bila tidak diikuti penataan aspek-aspek lainnya seperti, pemenuhan sarana pendukung, perbaikan kesejahteraan guru, pemetaan peran sekolah, keluarga dan masyarakat, dan lain-lain. Berbagai forum telah membahas dua aspek penting dalam pendidikan, yakni sarana dan perbaikan pendapatan guru, tetapi pemetaan peran ketiga pelaku pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat ini masih jarang dibahas. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud membahas bagaimana mengharmoniskan peran masing-masing pelaku pendidikan tersebut agar terjadi sinergi yang produktif dan mutualistik.

Peran Sekolah antara Harapan dan Kenyataan

Dari berbagai persoalan yang melingkupi dunia pendidikan, ada satu persoalan krusial yang sering luput dari perhatian para perumus dan pelaksana kebijakan pendidikan. Persoalan tersebut adalah belum adanya harmonisasi peran antara berbagai pelaku pendidikan, sehingga upaya pendidikan yang dilakukan terkadang justru saling berbenturan. Sebagaimana diketahui bahwa pelaku pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya ternyata beban pendidikan lebih banyak dipikulkan kepada institusi sekolah. Kedua pelaku pendidikan lainnya (keluarga dan masyarakat) justru lebih sering diabaikan dari persoalan pendidikan, semua aspek pendidikan diserahkan kepada sekolah. Kenyataan ini tentu tidak adil, karena sebagian dari waktu peserta didik berada di keluarga dan masyarakat.

Rendahnya indeks kualitas sumber daya manusia (SDM) atau sering disebut *human development index (HDI)*, merosotnya moral dan rendahnya penghayatan nilai-nilai agama generasi muda seringkali menjadikan sekolah sebagai pihak yang paling disalahkan, karena dianggap gagal dalam mendidik siswanya. Mengapa kita tidak menuduh pelaku pendidikan lainnya? Bagaimana peran keluarga dan masyarakat sendiri dalam proses pendidikan generasi muda? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bermaksud untuk membela institusi sekolah dan melemparkan tuduhan kepada pihak lain, tetapi sekedar untuk menggugah kita agar menempatkan posisi ketiga pelaku pendidikan pada proporsi yang sebenarnya.

Banyak sekolah yang terjebak pada berbagai tuntutan masyarakat dan kepentingan sesaat yang tidak selalu diperhitungkan efek jauhnya. Banyak sekolah tidak mempunyai kejelasan idealisme. Ukuran keberhasilan anak didik lebih kepada prestasi kognitif, sehingga apa yang dilakukan adalah bagaimana mentransfer pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada anak didik agar dapat mencapai angka prestasi setinggi-tingginya. Rupa-rupanya apa yang dilakukan oleh sekolah berbanding lurus dengan tuntutan masyarakat saat ini. Sekolah melakukan hal demikian juga dalam

rangka memenuhi keinginan masyarakat yang menghendaki anak-anaknya menjadi pintar apalagi bila anak dapat memperoleh peringkat di kelasnya. Sementara aspek lainnya yang termasuk dalam ranah afektif dan psikomotor tidak begitu dipersoalkan. Dampak dari perilaku sekolah dan citra keberhasilan anak didik yang dibangun oleh masyarakat adalah banyaknya lulusan suatu lembaga pendidikan yang berhasil mencapai nilai tinggi, tetapi tidak dapat berbuat banyak di masyarakat/ lapangan pekerjaan.

Fenomena sekolah saat ini ibarat tukang besi (empu) yang hanya sekedar membuat peralatan tanpa tahu untuk apa alat itu dibuat. Dunia pendidikan seperti tidak diorientasikan pada realitas kehidupan secara kreatif dan visioner. Realitas yang dimaksud misalnya sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut, tetapi sangat sedikit pendidikan yang berorientasi kelautan. Sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian dalam bidang pertanian tetapi orientasi pendidikan ke pertanian belum secara sungguh-sungguh, sebagian besar bidang usaha adalah usaha kecil menengah (UKM) tetapi pendidikan yang berorientasi pada UKM hampir dapat dibilang tidak ada. Adanya disorientasi pendidikan yang oleh Asy'ari (2002) disebut sebagai pendidikan anti realitas ini berdampak pada kekayaan laut yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal tetapi justru menjadi ladang pencurian nelayan negara-negara lain, banyak dari penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan ada departemen pertanian tetapi kita selalu impor beras, buah-buahan, gula, dan bahan-bahan pertanian lainnya. UKM yang sebenarnya banyak menyerap tenaga kerja kurang terurus karena lebih banyak memperhatikan pengusaha besar (konglomerat), sehingga banyak terjadi gelombang migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) lari ke luar negeri sebagai kuli/buruh rendahan yang boleh jadi dapat merendahkan martabat bangsa.

Kehinaan perlakuan yang menimpa para TKI di Malaysia—mungkin terjadi pula di negara lain tempat TKI bekerja—semestinya menjadi cambuk bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan introspeksi dan membenahan secara fundamental terhadap kebijakan

pendidikan. Akankah fenomena gelombang migrasi TKI ke Malaysia yang begitu dihinakan dan terampas hak-haknya sebagai pekerja akan berjalan terus? Jawaban atas pertanyaan ini kembali kepada kemauan politik para penyelenggara negara untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam manajemen kenegaraan termasuk diantaranya adalah memperbaiki pendidikan untuk rakyatnya. Dengan kebijakan pendidikan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, maka para TKI akan menjadi tenaga kerja menengah yang mengandalkan *skill*. Lapangan pekerjaan yang sebenarnya sedemikian banyak di Indonesia tetapi tidak terisi oleh rakyatnya sendiri. Hal ini terjadi karena sistem pendidikan yang ada, mungkin secara tidak disadari telah membantu memperderas arus kaum muda yang pergi dari desa-desa ke pusat-pusat kota besar ke negara lain. Juga sebagai akibat logis dari sistem pendidikan yang ternyata mendidik orang untuk menjauhi jenis pekerjaan yang ada di desa-desa dan mencari kesempatan kerja yang diimpikan di kota-kota. Sistem itu juga telah membangkitkan harapan-harapan yang bersifat urban. Keadaan ini oleh Sudjatmoko (1988) disebut sebagai *internal brain drain*, sehingga desa-desa kehilangan tenaga potensialnya untuk pembangunan desanya. Kondisi pendidikan kita sungguh jauh dari harapan.

Ke depan, peran sekolah perlu ditata, paling tidak ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memposisikan sekolah pada koridor yang sesuai agar fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat lebih optimal dan menghasilkan lulusan yang memiliki sejumlah kompetensi dan keterampilan hidup. Langkah tersebut antara lain: (1) reorientasi pendidikan lembaga sekolah agar tidak anti realitas; (2) menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan pada tiap jenjang melalui konsensus nasional antara pemerintah, sekolah, dan seluruh lapisan masyarakat; (3) peningkatan relevansi yang mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat; (4) peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan menuju pengelolaan pendidikan berbasis sekolah; (5) Penyelenggaraan pendidikan yang mendasarkan pada pertimbangan asas keadilan. Hal ini

berkaitan dengan pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, pemerataan mutu pendidikan dengan bersandar pada terpenuhinya standar kompetensi minimal, dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi semua siswa pada semua lapisan masyarakat; (6) perubahan paradigma (*paradigm shift*) pendidikan, dari pendidikan yang tidak berakar budaya menjadi pendidikan yang berakar budaya.

Idealisasi Peran Keluarga dalam Pendidikan

Keluarga merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai tugas seperti umumnya sistem sosial lainnya, yakni menjalankan tugas-tugas, pencapaian tujuan, integrasi dan solidaritas, serta pola kesinambungan atau pemeliharaan keluarga. Keluarga mempunyai karakteristik yang berupa diferensiasi peran dan struktur organisasi yang jelas (Megawangi, 1999). Menurut Levi sebagaimana dikutip Megawangi (1999), keluarga sebagai suatu sistem dapat berfungsi apabila memenuhi persyaratan struktural sebagai berikut. Pertama, ada diferensiasi peran karena masing-masing anggota keluarga harus mempunyai alokasi peran. Kedua, alokasi solidaritas: distribusi relasi antaranggota keluarga menurut cinta, kekuatan, dan intensitas hubungan. Cinta atau kepuasan menggambarkan hubungan antaranggota. Kekuatan mengacu pada keutamaan sebuah relasi relatif terhadap relasi lainnya. Intensitas adalah kedalaman relasi antaranggota menurut kadar cinta, kepedulian, ataupun ketakutan. Ketiga, alokasi ekonomi: distribusi barang dan jasa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Diferensiasi tugas juga ada dalam hal ini, terutama dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi dari barang dan jasa dalam keluarga. Keempat, alokasi politik: distribusi kekuasaan dalam keluarga dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan keluarga. Agar keluarga dapat berfungsi, distribusi kekuasaan pada tingkat tertentu diperlukan. Kelima, alokasi integritas dan ekspresi, yakni distribusi teknik/cara untuk sosialisasi, internalisasi, dan pelestarian nilai-nilai dan perilaku yang memenuhi tuntutan norma yang berlaku untuk setiap anggota keluarga.

Berangkat dari persyaratan tersebut, mungkin banyak di antara keluarga yang tidak memenuhi syarat seideal sebagaimana disebutkan di atas. Dewasa ini peran pendidikan keluarga makin berkurang, kenyataan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan di masyarakat untuk sedini mungkin memasukkan anak-anak ke pendidikan formal, waktu tempuh pendidikan menjadi lebih lama, sehingga untuk menghasilkan lulusan yang dewasa dan mandiri perlu biaya dan waktu yang banyak, ironisnya justru kedewasaan fisiologis generasi muda yang menjadi lebih cepat daripada kedewasaan intelektual dan sosial-ekonomi yang sebenarnya lebih penting.

Berbagai alasan muncul dari para orang tua yang sibuk bekerja, sibuk mengaktualisasikan dirinya di masyarakat tetapi tidak sibuk mengurus anggota keluarganya (anak-anak). Tidak jarang orang tua yang lebih suka pada *full day school* dan menyerahkan segala sesuatunya pada sekolah, lembaga bimbingan, dan teman-temannya. Keluarga yang memperlakukan anaknya seperti itu biasanya keluarga yang mengalami disorganisasi. Bentuk disorganisasi lain, misalnya unit keluarga tidak lengkap, kurang komunikasi antar-anggota, krisis keluarga, putusnya perkawinan orang tua (Soekanto, 1989). Akibatnya fungsi kontrol keluarga lemah dan tidak salah bila anak kemudian mengalami berbagai masalah yang berujung pada kehancuran masa depannya. Peran keluarga sebagai lembaga pendidikan informal dalam hal ini tidak berfungsi. Padahal apa yang diperoleh di sekolah hanyalah sebagian saja dari aspek kehidupan ini.

Keharmonisan sebuah keluarga sebagai organisasi dalam suatu sistem sosial sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Keluarga merupakan taman pendidikan pertama, terpenting, dan terdekat yang bisa dinikmati oleh anak (Gunaryadi, 2004). Optimalisasi fungsi pendidikan dapat diharapkan dari keluarga yang harmonis, meskipun dari keharmonisan saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan usaha orang tua yang sungguh-sungguh, tetapi paling tidak ini dapat menjadi sebuah modal awal untuk proses penyadaran bagi keluarga untuk berperan secara aktif mutualistik dengan pelaku pendidikan lainnya. Penyadaran terhadap keluarga ini

diperlukan mengingat bahwa ada di antara orang tua yang belum memiliki atensi terhadap proses pendidikan yang sedang dijalankan anak-anaknya.

Sekolah sebagai sebuah wadah pendidikan bukanlah institusi yang mampu melakukan segala-galanya, dari aspek ilmu pengetahuan, etika, seni, agama, dan setumpuk tugas lainnya. Hal ini tidak mungkin dilakukan mengingat keterbatasan waktu anak didik di sekolah. Untuk itu perlu ada pemilahan wilayah atau peta peran. Sebaiknya sekolah melakukan sebagian saja dari aspek-aspek tersebut yang sifatnya terukur (*measurable*). Pendidikan di sekolah lebih memfokuskan diri pada pembentukan nalar intelektual dan keterampilan motoris (Danim, 2003). Sementara keluarga dan masyarakat berperan menanamkan nilai-nilai moral, etika, agama, dan aspek-aspek praktis yang ada pada masyarakat. Sayangnya, peran keluarga saat ini telah mengalami penurunan. Menurunnya atau berkurangnya peran dan fungsi keluarga merupakan akibat dari modernisasi (Megawangi, 1999).

Kesibukan masing-masing anggota keluarga (bapak dan ibu) telah menelantarkan anak. Bapak sibuk dengan pekerjaannya, sementara sang ibu yang kini telah termakan oleh faham feminisme liberal banyak yang bekerja di sektor publik sehingga banyak anak yang kehilangan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Pendidikan anak banyak diserahkan kepada pembantu atau tempat penitipan anak, ini menunjukkan ketidaknormalan fungsi keluarga. Menurut penelitian Vogell dan Bell (*dalam* Megawangi, 1999), keluarga yang tidak berfungsi normal akan menyebabkan munculnya anak-anak bermasalah. Di Barat sendiri, sebagai negara asal gerakan feminisme muncul gerakan *back to family* dengan misi memperkokoh institusi keluarga untuk membangun masyarakat madani (*civil society*).

Sebagian masyarakat tidak begitu risau ketika anaknya tidak memperoleh pendidikan keagamaan yang proporsional, tetapi jika anaknya belum memperoleh pendidikan di sekolah, orang tua akan mati-matian mencarikannya. Bahkan, banyak di antaranya, demi

memperoleh pendidikan dari sekolah yang dianggapnya *bonafide*, orang tua rela membiarkan *aqidah* anaknya terancam, dengan membiarkan anaknya memasuki sekolah yang mempunyai misi berlawanan secara diametral dengan nilai-nilai yang dianutnya. Ini berarti orang tua tidak bertanggung jawab terhadap masa depan akhirat anaknya, hanya karena khawatir terhadap masa depan dunianya. Semestinya, orang tua yang memiliki keimanan dari agama manapun tidak akan rela hal itu terjadi. Inilah salah satu karakter orang tua yang terbawa arus budaya materialis tanpa landasan keyakinan kokoh (Saefulhadi dan Nurhayati, 2002).

Untuk langkah perbaikan diperlukan waktu yang cukup lama, karena hal ini berkaitan dengan perubahan filosofis makna keluarga yang saat ini telah tereduksi oleh berbagai paham yang berkembang di dunia. Untuk mengambil peran secara signifikan dalam pendidikan keluarga, maka keharmonisan sebuah keluarga amat diperlukan. Keluarga mempunyai nilai strategis dalam pendidikan, dengan wilayah pendidikan yang mungkin tidak tersentuh oleh pendidikan di sekolah. Keluarga dapat memberikan pendidikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat secara kontekstual dan praktis. Ukuran keberhasilan pendidikan dalam keluarga bukan angka prestasi, tetapi kedewasaan secara sosial dan kemampuan untuk hidup bersama (*to life together*). Keluarga juga berperan penting dalam mendorong anak untuk berprestasi di sekolah. Pemberian pujian dan hukuman, harapan dan ancaman, dan kasih sayang dari keluarga merupakan bentuk perhatian yang dapat menggugah anak untuk berprestasi.

Untuk memperoleh hasil yang optimal dari suatu proses pendidikan diperlukan dialog dan kesepakatan antara pihak sekolah dengan keluarga. Laporan berkala dan pelibatan orang tua sebagai bentuk partisipasi keluarga dalam proses pendidikan anak di sekolah akan memberikan nuansa yang bermakna bagi anak didik bahkan bagi para gurunya. Harmonisasi peran antara keluarga dan sekolah mutlak diperlukan, bila kita ingin bersungguh-sungguh melakukan perbaikan pendidikan.

Memposisikan Peran Masyarakat Ddalam Pendidikan

Masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mengemban tugas pelaksanaan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas. Keduanya harus bersinergi dalam mengemban tugas tersebut. Hanya saja, selama ini yang terjadi bukan sinergi, tetapi pemerintah sebagai pelaku utama pendidikan seringkali menjadikan pernyataan Undang-Undang tersebut sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab. Alasan pemerintah bila tidak dapat melaksanakan amanah pendidikan secara baik adalah bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan pemerintah tidak dapat disalahkan. Akibatnya, persoalan pendidikan menjadi semakin rumit, yang timbul kemudian adalah mentalitas saling menyalahkan (Bastian, 2002).

Masyarakat selama ini terkesan hanya sebagai sumber dana pendidikan saja (SPP dan BP3), padahal masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam proses pendidikan. Masyarakat seringkali memperlakukan para peserta didik secara tidak proporsional dan tidak menempatkan anak yang sedang dalam tahap perkembangan sesuai tarafnya. Perlakuan masyarakat terhadap anak didik pada umumnya terpolarisasi pada dua kutub yang berlawanan. Di satu sisi masyarakat menuntut terlalu banyak, di sisi lain masyarakat seringkali tidak memberikan kepercayaan penuh kepada anak didik untuk mengaktualisasikan diri di masyarakat. Beberapa permasalahan di masyarakat, seperti pengangguran, dekadensi moral, kesenjangan sosial-ekonomi, dan munculnya penyakit-penyakit sosial seringkali menjadikan lembaga pendidikan sebagai pihak tertuduh dan harus bertanggung jawab atas terjadinya itu semua (Saefulhadi, 2002). Lembaga pendidikan memang mempunyai andil atas terjadinya hal-hal tersebut, tetapi lembaga pendidikan bukan merupakan tertuduh tunggal karena lembaga pendidikan hanyalah salah satu bagian dari pelaku pendidikan dalam tatanan sosial secara makro.

Indikator keberhasilan suatu lembaga pendidikan seringkali hanya dilihat oleh masyarakat pada seberapa besar lulusannya terserap oleh bidang-bidang pekerjaan formal. Sementara itu, dunia

kerja pendidikan menilainya dari sudut penguasaan keterampilan yang dimiliki dan kesiapan mereka sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Meskipun dunia pendidikan telah berusaha sedemikian rupa, agar lulusannya dapat mengimbangi perkembangan pasar kerja, namun tampaknya bila keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan harus sesuai dengan tuntutan masyarakat dan pasar kerja, keberhasilan pendidikan akan sulit terpenuhi. Ada dua alasan mengapa harapan itu sulit terwujud. Pertama, pertumbuhan lapangan kerja selalu lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja. Kedua, peralatan yang dipakai di dunia pendidikan selalu lebih ketinggalan dari peralatan yang dipakai pada dunia kerja/industri (Saefulhadi dan Nurhayati, 2002).

Revolusi iptek memang telah berpengaruh begitu besar terhadap berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat, salah satu implikasinya dalam dunia pendidikan adalah munculnya patokan keberhasilan yang dibuat oleh masyarakat terhadap suatu *out put* pendidikan. Bila seorang anak didik mampu memasuki bidang-bidang kerja yang berhubungan dengan industri, orang tua akan memiliki kebanggaan karena dianggap sebagai jaminan materi kehidupan di masa depan. Sementara prestasi yang berupa nilai-nilai etika, keagamaan, dan mentalitas bukan merupakan prioritas utama.

Salah satu peran masyarakat yang sangat kuat adalah melalui media massa. Menurut Bungin (2001: 24-25), media massa sebagai produk dari masyarakat, ternyata mampu menciptakan rekayasa sosial, mengubah pola hidup, dan cara pandang. Media massa yang paling intensif memasukkan nilai-nilai adalah televisi. Televisi telah muncul sebagai fenomena perubahan sosial, yang banyak didominasi oleh ide-ide materi Marx. Ide-ide itu dituangkan ke dalam instrumen-instrumen kapitalis, sehingga akhirnya perilaku masyarakat menjadi bagian dari masyarakat kapitalis yang konsumtif dan dari sistem produksi itu sendiri. Sinetron dan iklan secara tidak disadari telah menanamkan nilai-nilai semu sesuai dengan misi sinetron dan pesan iklan. Pergaulan antarlawan jenis yang relatif

bebas, eksploitasi seksual, angan-angan kehidupan mewah, gaya hidup konsumtif, dan lain-lain sangat sering digambarkan dalam berbagai jenis sinetron dan iklan. Kebiasaan para remaja menyaksikan berbagai adegan dalam acara televisi yang diantaranya bertentangan dengan nilai-nilai agama menyebabkan para remaja menjadi permisif terhadap berbagai perbuatan yang dikategorikan maksiat. Gaya hidup (baca: penampilan) remaja tidak jauh berbeda dengan para bintang Holywoods, tetapi otak dan kemampuannya kosong.

Pemerintah tampaknya dalam hal penyediaan dana sulit diharapkan. Untuk itu, agar pendidikan ini tetap berjalan dan agenda pembaruan pendidikan dapat dilaksanakan maka peran swasta sebagai bagian dari masyarakat harus lebih dioptimalkan. Saat ini, pendidikan bukannya semakin dapat dijangkau oleh seluruh rakyat, tetapi justru semakin mahal yang berarti menjauhkan pendidikan dari keterjangkauan seluruh lapisan masyarakat. Pengaruh kapitalisme ternyata tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah di sektor pendidikan. Menjamurnya praktik-praktik komersialisasi pendidikan merupakan wujud 'kapitalisme dalam pendidikan, sehingga tidak berlebihan bila di masyarakat muncul sinisme, "jangan berharap orang miskin dapat menempuh pendidikan tinggi, pendidikan hanya untuk orang kaya". Pendidikan memang membutuhkan dana besar, tetapi apakah dana tersebut harus lebih banyak dibebankan kepada rakyat, lalu di mana peran pemerintah? Bersungguh-sungguhkah pemerintah untuk melaksanakan agenda perbaikan pendidikan, bila untuk menghidupkan sektor perbankan dikucurkan dana triliunan yang akhirnya dibawa lari para bankir, tetapi sangat kikir untuk membangun pendidikan, lagi-lagi rakyat yang dibebani.

Harmonisasi dan Sinergi Peran Pelaku Pendidikan

Para pelaku pendidikan mempunyai posisi dan peran yang dapat saling mengisi dalam rangka melakukan reproduksi sosial.

Pendidikan sebagai reproduksi sosial (Jacob, 1988) sangat menentukan bagaimana warna masyarakat mendatang. Pendidikan yang berhasil akan mengubah tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Selama enam dekade negara ini merdeka, pendidikan di negeri ini telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Realitas empirik menunjukkan bahwa negara kita termasuk dalam jajaran negara-negara dengan tingkat korupsi sangat tinggi. Korupsi merupakan cermin dari moralitas yang sangat rendah. Pendidikan menurut Danim (2003) adalah moralisasi masyarakat, terutama peserta didik. Dengan mengacu kepada pernyataan tersebut, berarti kenyataan bahwa di Indonesia korupsi sangat tinggi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan di Indonesia telah gagal menjalankan fungsinya.

Pendidikan yang dimaksud pada uraian di atas lebih dari sekedar pendidikan di sekolah, tetapi pendidikan sebagai jaring-jaring kemasyarakatan (*education as community networks*). Wilayah pendidikan sekolah dan keluarga/masyarakat sebagaimana telah disebut di depan berbeda. Pendidikan di sekolah lebih memfokuskan diri pada pembentukan nalar intelektual dan keterampilan motorik, sementara pendidikan di keluarga dan masyarakat lebih menitikberatkan pada pembentukan nalar emosional dan afeksi. Pembagian wilayah ini tidak secara kaku. Artinya, pembentukan nalar emosional dan afeksi tetap menjadi bagian dari tugas sekolah yang praksisnya termuat secara tersembunyi dalam kurikulum (*hidden curriculum*).

Usaha masing-masing pelaku pendidikan harus dirumuskan sebagai komitmen bersama, agar tidak saling berbenturan dan kontraproduktif atau terjadi disharmonisasi yang pada akhirnya justru membingungkan anak didik. Contoh sederhana dari upaya pendidikan yang saling berbenturan dan kontraproduktif antara lain sebagai berikut.

1. Guru menganjurkan agar para siswa bertutur kata yang sopan dan lemah lembut berbenturan ketika ia berada di masyarakat

dijumpainya anggota masyarakat lainnya berkata kasar dan di rumah dibentak-bentak orang tuanya.

2. Nasihat guru tentang perlunya mentaati aturan lalu lintas, berbenturan dengan kenyataan perilaku sopir angkutan kota, masyarakat, dan bahkan sikap polisi sendiri.
3. Pelajaran bahwa untuk mengambil keputusan diperlukan musyawarah, tetapi guru dan orang tua sendiri sering bertindak otoriter.
4. Setiap manusia harus jujur dan amanah, tetapi perilaku para elit politik sama sekali tidak mencerminkan sikap jujur dan amanah.
5. Pelarangan buku-buku, komik, VCD berbau pornografi bagi siswa berbenturan dengan realitas tampilan media massa, baik cetak maupun elektronik yang menampilkan simbol-simbol seksual yang merangsang nafsu syahwat.

Masih banyak lagi ironi yang menggambarkan betapa usaha pendidikan menjadi kurang bermakna manakala masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan berbagai perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan dengan diberlakukan otonomi pendidikan sebab sekolah diberi wewenang untuk mengatur dirinya sendiri atau yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). Dengan MBS, diharapkan masyarakat merasa lebih memiliki sekolah –salah satu implementasi MBS adalah membuka diri terhadap masyarakat luas, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua siswa menjadi anggota Dewan Sekolah– karena mereka merasa dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan adanya dewan sekolah, diharapkan terjadi koordinasi antara pendidikan di sekolah dan di luar sekolah. Dengan adanya dewan sekolah akan ada perpaduan, koordinasi, dan sinkronisasi agar masing-masing tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak saling lepas satu dengan yang lainnya (Bastian, 2002). Usaha menyelaraskan pendidikan sekolah dengan pendidikan di luar sekolah merupakan kebutuhan mendesak agar pendidikan di luar sekolah mampu menjadi penyempurnaan atau pelengkap dari pendidikan sekolah.

Bila penyelenggaraan pendidikan telah selaras, maka kemungkinan akan terlaksana prinsip *multi-entry* dan *multi-exit*. Program pendidikan menjadi sinkron dengan kebutuhan pribadi, lingkungan, dan dunia kerja.

Strategi Mengharmoniskan Peran Pelaku Pendidikan

Berbagai fenomena ketidakharmonisan peranan masing-masing pelaku pendidikan sudah begitu banyak, sehingga seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak dipermasalahkan. Untuk membangun masyarakat madani diperlukan upaya harmonisasi peran ini agar pendidikan tidak mengalami jalan buntu. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengharmoniskan peran pelaku pendidikan, antara lain sebagai berikut.

1. Membangun komitmen

Ketiga pelaku pendidikan harus mempunyai komitmen yang didasari kesadaran, kemauan, dan kesungguhan untuk mewujudkan masyarakat madani, yakni masyarakat berbudaya, cerdas, dan sejahtera. Komitmen yang sungguh-sungguh dalam upaya mencerdaskan masyarakat tersebut dalam bahasa agama disebut dengan *jihad tarbiyah*. Dengan *jihad tarbiyah* ini antara sekolah, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama, beriringan, saling mengisi dan membantu (*ta'awun*) untuk mencapai tujuan yang sama.

2. Pendekatan budaya

Pendekatan budaya atau dalam dataran implementatif lebih dikenal sebagai kultur sekolah merupakan upaya mencari jalan keluar dari kebuntuan sekolah yang tertatih-tatih dalam pencapaian visi dan misi sekolah. Dalam pendekatan budaya sekolah dianggap sebagai komunitas/masyarakat kecil yang memiliki pola dasar asumsi, sistem nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan dan berbagai bentuk produk sekolah yang akan mendorong seluruh warga sekolah untuk bekerjasama yang didasarkan rasa saling mempercayai,

mengundang partisipasi seluruh warga, mendorong munculnya gagasan-gagasan baru, dan memberikan kesempatan terlaksananya pembaharuan di sekolah (Zamroni, 2005). Budaya sekolah dapat berasal dari masyarakat bila budaya kondisi masyarakat saat itu memungkinkan atau sebaliknya justru sekolah yang dapat menjadi agen perubahan masyarakat. Dalam pendekatan budaya, antara sekolah dan masyarakat dapat saling mengisi dan membangun budaya baru menuju masyarakat belajar.

3. Learning organization (LO)

LO yang diterjemahkan sebagai organisasi pembelajar, menurut Garvin dalam Ismawan (2005) adalah organisasi yang terlatih menciptakan, belajar dan memindahkan pengetahuan, dan memodifikasi perilaku untuk mencerminkan perilaku dan wawasan yang baru. LO berusaha membangun masyarakat berkomitmen, yakni komitmen untuk memecahkan berbagai disfungsi kelembagaan, yang berupa fragmentasi, kompetisi dan reaksi. Tugas LO adalah menjadikan pola berpikir fragmentasi menjadi berpikir sistemik, kompetisi menjadi kooperasi, dan reaktif menjadi kreatif (Kofman dan Senge, 1993).

Implementasi dari LO di sekolah adalah bahwa sekolah sebagai lembaga harus mampu menempatkan dirinya sebagai selalu berusaha mendeteksi segala kekurangannya, warga sekolah memiliki kemauan untuk belajar secara terus menerus, masing-masing warga sekolah merasa sebagai suatu sistem yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Dengan berpikir sistemik, bertindak dengan kesadaran untuk bekerjasama antara ketiga pelaku pendidikan, dan secara bersama-sama membangun masyarakat kreatif dalam melaksanakan pendidikan, maka akan terjadi harmoni. Harmoni berkaitan dengan kesatuan arah, yakni suatu proses bagaimana potensi-potensi individu disatukan secara sinergis dalam organisasi. Kekuatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat disinergikan sehingga membentuk suatu kekuatan pendidikan yang besar.

4. Kurikulum berbasis moral

Berbagai kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia dirasa sangat padat dengan materi, tidak terkecuali kurikulum baru yang disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang kemudian bernama KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Kurikulum-kurikulum yang pernah ada bersifat asosial, tercerabut dari permasalahan yang ada di masyarakat. Sebagai bukti, saat ini permasalahan di masyarakat yang paling akut yang dapat menyebabkan negara ini bangkrut adalah korupsi. Pendidikan selama ini gagal membentuk manusia amanah, jujur, dan bernurani, meskipun telah berhasil mendidik manusia Indonesia menjadi cerdas dan pintar. Orang Indonesia yang memiliki kompetensi tinggi dalam berbagai aspek sudah sangat banyak, tetapi sedikit yang mempunyai moralitas *amanah*. Dengan demikian sesungguhnya kurikulum yang diperlukan saat ini bukan KBK, tetapi kurikulum berbasis moral (KBM).

Konsep moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral merupakan bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Ukuran kebaikan atau moralitas di masyarakat adalah norma-norma moral. Menurut Magnis Suseno (Budiningsih, 2004), moralitas terjadi apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Bila pendidikan moral di sekolah berhasil, maka dampak pendidikan akan tampak pada para lulusannya yang berperilaku dengan berpegang pada nilai-nilai moral. Bila kelak mereka menjadi penyelenggara negara maupun sebagai masyarakat umum mereka bertindak dengan kesadaran, sebagai sikap hati yang tercermin lewat tindakan lahiriah secara ikhlas. Untuk membangun karakter manusia dengan moralitas tinggi tidak dapat dilakukan dengan pendidikan yang tidak sungguh-sungguh, perlu ada upaya yang gigih, terprogram, dan amanah. Kesungguhan untuk membangun karakter manusia bermoralitas tinggi ini diantaranya terwujud dalam penyusunan KBM.

Dengan KBM ini masyarakat mempunyai harapan terhadap pendidikan untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan keteringgalan akibat korupsi. Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang sangat akut, berbagai lini kehidupan dari yang paling bawah sampai level tinggi tidak berjalan secara normal karena korupsi. Untuk mengatasinya memerlukan waktu lama, mungkin satu generasi. Penyelesaian masalah tersebut membutuhkan upaya sungguh-sungguh melalui pendidikan.

5. Peran serta masyarakat

Masyarakat merupakan aktor penting dalam pendidikan. Tanpa ada dukungan masyarakat, pendidikan menjadi kurang bermakna. Masyarakat mempunyai berbagai fungsi terhadap pelaksanaan pendidikan selain sebagai pelaksana pendidikan itu sendiri, seperti fungsi kontrol, fungsi evaluasi, fungsi pengakuan, dan lain-lain. Peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan dianggap masih rendah. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, tidak pada proses pendidikan. Kebijakan Depdiknas dengan penerapan MBS (manajemen berbasis sekolah) yang antara lain mensyaratkan adanya dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan strategi agar sekolah dapat semakin mandiri, mendorong agar masyarakat dan orang tua siswa lebih aktif berpartisipasi dan terlibat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan (Gunaryadi, 2004). Hanya dalam pelaksanaannya, komite ini lebih banyak sebagai stempel sekolah. Kasus somasi oleh sejumlah LSM terhadap sekolah-sekolah negeri di Yogyakarta karena menarik dana terhadap orang tua siswa yang terlalu tinggi (diduga karena *mark up*) merupakan contoh nyata dari tidak berfungsinya komite tersebut. Berbagai elemen masyarakat dalam hal ini tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan.

Di samping itu, suatu sekolah yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses pendidikannya, lulusannya hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena ia tidak dapat beradaptasi dengan kondisi masyarakat. Agar lulusan suatu sekolah dapat diterima dan

berperan di masyarakat, maka dalam pelaksanaan pendidikan perlu ada harmonisasi, mungkin dapat berupa kurikulum muatan lokal atau perlu ada masukan dari masyarakat melalui suatu forum evaluasi bersama secara berkala.

6. Membangun keluarga sebagai madrasah

Kajian-kajian empiris menunjukkan bahwa peranan keluarga berkorelasi positif dan signifikan dengan prestasi belajar anak. Sebuah studi yang dilakukan Slameto (2002) di SD Laboratorium UKSW Salatiga, mendukung preposisi tersebut. Fungsi keluarga menempati posisi sentral dalam pendidikan karena di keluarga sebagian besar waktu siswa dihabiskan. Orang tua merupakan figur utama dan pertama dilihat dan ditiru oleh anak-anak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang kurang lebih menyatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), akan menjadi muslim, nasrani, atau majusi tergantung pendidikan orang tuanya. Menurut Idris dan Jamal (1992), peranan orang tua dalam mendidik anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan watak, dan keterampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan, serta menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik dan disiplin. Untuk melaksanakan peran tersebut berarti orang tua harus berusaha menjadikan rumah sebagai *madrasah*.

Madrasah dalam keseharian disinonimkan dengan sekolah, tetapi sebenarnya lebih dari itu karena di dalam madrasah juga ditanamkan tata cara bermasyarakat secara aktual, pengajaran agama, dan akhlak melalui kontrol, teladan dan praktik langsung. Sejalan dengan modernitas, kecenderungan orang tua saat ini adalah menyerahkan pendidikan anak secara penuh kepada sekolah. Sekolah memang berperan sebagai *in loco parentis* atau mengambil peran orang tua, tetapi institusi sekolah tidak dapat mengambil semua peran orang tua dalam mendidik anak. Yang terjadi adalah orang tua sibuk bekerja dengan anggapan yang penting kebutuhan materi anak tercukupi, pagi sampai siang sekolah dan sorenya les/ikut bimbingan belajar,

sehingga interaksi anak dengan orang tua sangat sedikit. Rumah hanya menjadi tempat berkumpul setelah masing-masing anggota keluarga sibuk dengan aktivitasnya. Bahkan tidak sedikit keluarga yang dirundung masalah, keluarga pecah, inharmoni, kebiasaan selingkuh, dan terlalu sibuk dengan urusan materi. Menurut Gunaryadi (2004), keluarga yang demikian akan menghasilkan individu-individu yang bersikap dan berperilaku masa bodoh, kurang empati, tidak memiliki kepedulian terhadap hak orang lain, egois dan kasar.

Untuk mengoptimalkan fungsi keluarga dalam pendidikan, terlebih dahulu lembaga keluarga harus dibangun, dibina, dan dipelihara agar terjadi suasana harmonis. Dalam perspektif spiritual, target keluarga harmonis adalah menjadikan rumah sebagai surga (*baiti jannati*), rumah dapat menjadi penyejuk dan penenang jiwa. Dalam suasana demikian, pendidikan anak akan dapat berjalan dengan baik.

Penutup

Terwujudnya keharmonisan peran para pelaku pendidikan dalam rangka mengoptimalkan fungsi pendidikan adalah harapan yang dapat dicapai dengan kerja keras. Perubahan kurikulum, otonomi pendidikan, perubahan strategi pembelajaran, dan pengadaan seperangkat sumber pembelajaran tidak cukup. Untuk mencapai keselarasan tersebut diperlukan kemauan dan kesungguhan dari semua unsur penyelenggara pendidikan. Betapapun pihak sekolah berusaha untuk melakukan perbaikan dan keluarga menuntut anak-anaknya menjadi pribadi yang dewasa secara intelektual, sosial, dan religius, tidak akan pernah terwujud manakala tidak ada dialog dan komitmen bersama dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Jalan masih terbentang panjang, pendidikan kita masih tertatih-tatih menelusurinya. Pendidikan kita dapat melaju lebih kencang manakala terjadi harmonisasi peran masing-masing pelaku pendidikan. Kita akan mampu mengejar ketertinggalan pendidikan ini

sehingga kelak paling tidak dapat sejajar dengan kualitas pendidikan di negeri-negeri Jiran. *Wallahu a'lam.*

Daftar Pustaka

- Asy'ari, M. 2002. *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LESFI.
- Bastian, A. R. 2003. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama.
- Budiningsih, A. 2004. *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. 2001. *Imaji Media Masa: Konstruksi Sosial dalam Masyarakat Kapitalistik*. Yogyakarta: Jendela.
- Danim, S. 2003. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djohar. 2002. *Pendidikan Strategik Alternatif Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: LESFI.
- Gunaryadi. 2004. "Pendidikan Nasional, Globalisasi, dan Peran Keluarga". *Paper*. Seminar Peringatan Hardiknas PPI Wageningen University, 29 Mei 2004, Netherland.
- Hadi, S., Bambang, dan Nurhayati, I. 2002. "Hegemoni Budaya Industri dalam Pendidikan Kontemporer". *Cakrawala Pendidikan, Thn XIII No.3*.
- Idris, Z dan L. Jamal. 1992. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Grassindo.

- Ismawan, B. 2005. *Learning Organization Membangun Paradigma Baru Organisasi Pembelajar*. Jakarta: Cakrawala Media Pressindo Group.
- Koffman, F. and Senge, P. M. 1993. "Communities of Commitment: the Heart of Learning Organization". *Paper*. Diperoleh dari www.organizational_dynamics.com pada tanggal 12 Desember 2005.
- Megawangi, R. 1999. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Slameto. 2002. "Peranan Ayah dalam Pendidikan Anak dan Hubungannya dengan Prestasi Belajarnya". *Satya Wydya, Vol. 15, No.1*.
- Soekanto, S. 1991. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sudjatmoko. 1986. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Zamroni. 2005. "Mengembangkan Kultur Sekolah Menuju Pendidikan Yang Bermutu". *Makalah*. Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pengembangan Budaya Sekolah. UNY, 23 November 2005.